KONSEPTUALISASI PENDIDIKAN PPKn SD SEBAGAI INSTRUMEN PENGUATAN KARAKTER INKLUSIF DAN SIKAP DEMOKRATIS SISWA

Raudatul Jannah[*1], Dewa Bagus Sanjaya[2], I Nengah Suastika[3]
[1,2,3]Universitas Pendidikan Ganesha, Pendidikan Dasar, Indonesia

Email: [1]raudatul.jannah@student.undiksha.ac.id, [2]Bagus.sanjaya@undiksha.ac.id, [3]nengah.suastika@undiksha.ac.id

Abstract

Pancasila and Citizenship Education (PPKn) in elementary schools has strong potential to develop inclusive character and democratic attitudes, but this potential has not been fully integrated into inclusive classroom practices in Indonesia. This study aims to analyze and construct a conceptual framework for PPKn as a foundation for strengthening students' inclusive character and democratic attitudes. Using a qualitative library research approach, the study examines policy documents, national and international journal articles, and relevant research published between 2015 and 2024. Data are analyzed through content analysis and interpretive synthesis. The findings show that PPKn values, particularly Bhinneka Tunggal Ika, mutual cooperation, and social justice, embody inclusive principles that can be implemented through learning activities and classroom interactions. Discussion- and collaboration-based learning fosters empathy and positive attitudes among regular students toward students with special educational needs. An inclusive classroom climate grounded in PPKn values also provides an authentic setting for practicing democratic behavior. The Universal Design for Learning (UDL) framework is theoretically relevant to inclusive PPKn implementation. This study contributes to an inclusive PPKn learning model integrating character, citizenship, and inclusive education at the elementary school level.

Keywords : Pancasila and Citizenship Education, Inclusive character, Democratic attitudes, Inclusive education, Elementary school.

Abstrak

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dasar memiliki potensi besar untuk mengembangkan karakter inklusif dan sikap demokratis peserta didik. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik kelas inklusif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksi kerangka konseptual PPKn sebagai landasan penguatan karakter inklusif dan sikap demokratis peserta didik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji dokumen kebijakan, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian relevan yang diterbitkan pada 2015-2024. Data dianalisis melalui analisis isi dan sintesis interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai PPKn, khususnya Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan keadilan sosial, memuat prinsip-prinsip inklusif yang dapat diterapkan melalui kegiatan pembelajaran dan interaksi kelas. Pembelajaran berbasis diskusi dan kolaborasi dapat menumbuhkan empati serta sikap positif peserta didik reguler terhadap peserta didik berkebutuhan pendidikan khusus. Iklim kelas inklusif yang berlandaskan nilai-nilai PPKn juga menyediakan lingkungan autentik untuk mempraktikkan perilaku demokratis. Kerangka *Universal Design for Learning* (UDL) relevan secara teoretis bagi penerapan PPKn inklusif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pembelajaran PPKn inklusif yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kewarganegaraan, dan pendidikan inklusif di sekolah dasar.

Kata kunci: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Karakter inklusif, Sikap demokratis, Pendidikan inklusif, Sekolah dasar.

A. Pendahuluan

Indonesia memasuki era pendidikan yang semakin kompleks dengan ditetapkannya kebijakan pendidikan inklusi melalui (Permendiknas No. 70 Tahun 2009) Kebijakan ini mewajibkan sekolah reguler, termasuk Sekolah Dasar (SD), untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan memberikan layanan pendidikan yang setara. Namun, integrasi fisik semata tidak menjamin terciptanya inklusi sejati. Riset menunjukkan bahwa ABK masih kerap menghadapi stigmatisasi, *bullying*, dan marginalisasi sosial dari rekan sebayanya di sekolah inklusif (Kurniawati et al., 2014) dan (Forlin et al., 2013).

Pendidikan inklusif tidak dapat dipahami hanya sebagai penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Inklusi mencakup upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengurangi hambatan terhadap kehadiran, partisipasi, dan pencapaian seluruh peserta didik. Dengan demikian, keberhasilan kelas inklusif perlu dinilai melalui kualitas interaksi, kesempatan berpartisipasi, dukungan terhadap keragaman cara belajar, dan pengalaman belajar yang bebas dari diskriminasi. (Ainscow, 2020) menegaskan bahwa pengembangan inklusi memerlukan perubahan pada budaya, kebijakan, dan praktik sekolah, bukan sekadar perubahan administratif dalam penerimaan peserta didik. Perspektif ini menempatkan PPKn sebagai mata pelajaran yang potensial karena nilai Pancasila, keberagaman, keadilan sosial, dan demokrasi dapat diterjemahkan ke dalam pengalaman belajar yang memungkinkan semua peserta didik menyampaikan pendapat, bekerja sama, mengambil keputusan, dan menghargai perbedaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis berpotensi menjadi alat untuk membentuk karakter inklusif dan sikap demokratis yang sistematis karena merupakan subjek yang secara eksplisit menggabungkan nilai-nilai Pancasila, keberagaman, keadilan, dan demokrasi. Meskipun demikian, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa fokus utama pembelajaran PPKn tetap pada pemahaman konsep dan sila-sila Pancasila. Fokus yang lebih rendah, bagaimanapun, adalah internalisasi nilai yang dapat diterapkan dalam interaksi sosial nyata (Wahab & Sapriya, 2011; Winarno, 2020).

Bukti penelitian mutakhir menunjukkan bahwa sikap peserta didik terhadap teman penyandang disabilitas tidak otomatis menjadi positif hanya karena mereka berada dalam kelas yang sama. Di (Di Maggio et al., 2022) menemukan bahwa pengalaman berada dalam kelas yang sama tidak selalu berkaitan dengan sikap yang lebih positif, sedangkan penyajian peserta didik penyandang disabilitas secara positif dan berbasis kekuatan berkaitan dengan sikap yang lebih menerima. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembelajaran PPKn perlu dirancang melalui interaksi yang terstruktur, representasi yang tidak stereotip, tanggung jawab kelompok, dan fasilitasi guru.

Ketidaksesuaian *(gap)* dalam penelitian ini ada dua. Pertama, secara teoretis, belum ada kesimpulan teoretis yang secara ekplisit mengoperasionalisasikan nilai-nilai PPKn SD sebagai alat khusus untuk menciptakan karakter inklusif di kelas inklusi. Penelitian terdahulu lebih cenderung melihat pendidikan inklusi dan PPKn sebagai satu unit. Kedua, kerangka konseptual yang dapat digeneralisasikan kurang karena mayoritas penelitian sebelumnya bersifat deskriptif-implementatif untuk sekolah tertentu. Dengan menganalisis kepustakaan secara menyeluruh dan menyusun teori secara sistematis, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut.

Berdasarkan pemetaan awal terhadap literatur, kajian mengenai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, dan pendidikan inklusif telah berkembang secara

terpisah. Namun, masih terbatas kajian konseptual yang memetakan hubungan antara nilai PPKn, mekanisme pembentukan karakter inklusif, praktik demokratis di kelas inklusif, dan prinsip desain pembelajaran UDL dalam satu kerangka integratif untuk sekolah dasar. Keterbatasan lainnya terletak pada belum konsistennya penjelasan mengenai bagaimana nilai PPKn diterjemahkan menjadi indikator perilaku, aktivitas pembelajaran, dan kondisi kelas yang dapat diamati. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui sintesis interpretatif terhadap literatur dan dokumen kebijakan yang relevan. Klaim "belum ada penelitian" tidak digunakan karena kesimpulan tersebut memerlukan pencarian sistematis yang membuktikan ketiadaan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis bagaimana nilai-nilai PPKn SD dapat dikonseptualisasikan sebagai fondasi pendidikan inklusi; (2) mengkaji mekanisme pembentukan karakter inklusif melalui pembelajaran PPKn; (3) menganalisis peran PPKn dalam penanaman sikap demokratis dalam kelas inklusi; dan (4) merumuskan model pembelajaran PPKn yang ramah inklusi berdasarkan teori-teori mutakhir.

1. PPKn Sebagai Pendidikan Nilai dan Karakter

Secara teoretis, PPKn bukan sekadar transmisi pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge),* melainkan juga mencakup keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)* dan watak kewarganegaraan *(civic dispositions)* (Branson, 1998). Kerangka tiga dimensi ini relevan dengan tujuan inklusi: siswa tidak hanya perlu tahu tentang keberagaman, tetapi juga mampu berinteraksi secara inklusif dan bersikap demokratis dalam kehidupan nyata.

Secara hermeneutis, prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila-sila Pancasila terkait dengan filosofi inklusi. Prinsip kesetaraan martabat manusia adalah dasar anti-diskriminasi dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Baik semboyan Bhinneka Tunggal Ika maupun sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menghormati keberagaman sebagai kekuatan. Sila kelima, yang dikenal sebagai "Keadilan Sosial", menuntut akses yang adil dan setara, termasuk akses ke pendidikan. (Winarno, 2020) menyatakan bahwa nilai-nilai ini bukan peninggalan sejarah; mereka adalah pedoman moral yang dapat diandalkan untuk membangun warga negara yang inklusif.

2. Pendidikan Karakter Inklusif: Empati dan Anti-Diskriminasi

Pembentukan karakter inklusif melibatkan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling terkait. Penelitian (Allport, 1954) dalam *Contact Hypothesis* meletakkan fondasi bahwa interaksi yang terstruktur antara kelompok mayoritas dan minoritas dapat mengurangi prasangka, asalkan memenuhi syarat: kesetaraan status, kerja sama, dan dukungan otoritas. Kelas inklusi yang dikelola dengan baik memenuhi syarat-syarat ini, menjadikannya lingkungan ideal untuk pembentukan empati.

Berbeda dengan Allport, (Noddings, 2005) melalui *Ethics of Care* menekankan bahwa empati bukan hanya produk interaksi, tetapi harus dipupuk melalui relasi kepedulian yang otentik Implikasinya bagi PPKn: pembelajaran tidak cukup dengan metode ceramah tentang persaudaraan, tetapi harus menciptakan pengalaman nyata di mana siswa reguler merasakan dan merespons kebutuhan temannya yang ABK. Penelitian (Kurniawati et al., 2014) di Belanda yang konteksnya dapat dikontraskan dengan Indonesia menemukan bahwa interaksi terstruktur secara signifikan meningkatkan sikap positif siswa terhadap ABK, mengonfirmasi relevansi *Contact Hypothesis* dalam konteks sekolah inklusif.

Perbedaan temuan antar penelitian terdahulu perlu dicermati. (Forlin et al., 2013) menemukan bahwa perubahan sikap guru lebih menentukan keberhasilan inklusi dibanding metode pembelajaran semata, sedangkan (Sunardi et al., 2011) menekankan bahwa faktor

budaya sekolah dan keterlibatan orang tua merupakan prasyarat efektivitas program inklusi. Sintesis dari berbagai temuan ini menunjukkan bahwa PPKn harus dipahami dalam ekosistem pendidikan yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal.

3. Sikap Demokratis Dalam Konteks Kelas Inklusi

(Dewey, 1916) mendefinisikan demokrasi bukan sebagai sistem pemerintahan semata, tetapi sebagai cara hidup bersama *(a mode of associated living)* yang mengutamakan komunikasi, partisipasi, dan kemajuan bersama. Definisi ini sangat relevan bagi kelas inklusi: interaksi antara siswa reguler dan ABK dalam proyek kolaboratif merupakan praktik demokrasi nyata. (Banks, 2004) memperluas gagasan ini dalam kerangka Multicultural Education, menegaskan bahwa pendidikan demokratis harus aktif melawan ketidaksetaraan dan eksklusi.

(Fajar, 2009) dan (Somantri, 2001) secara spesifik mengontekstualisasikan sikap demokratis dalam PPKn Indonesia: menghargai perbedaan pendapat, bersedia berkompromi, mengutamakan musyawarah, dan menghormati hak minoritas. Nilai-nilai ini sangat fungsional dalam kelas inklusi di mana perbedaan cara belajar dan kemampuan merupakan realitas sehari-hari. Kemampuan siswa untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan tidak mendiskriminasi teman ABK adalah manifestasi konkret sikap demokratis dalam skala mikro.

4. *Universal Design for Learning* (UDL) Sebagai Kerangka Implementasi

Kerangka desain pembelajaran *Universal Design for Learning* (CAST, 2018) menerima keberagaman siswa sejak awal. Tiga prinsip UDL-Multiple *Means of Representation, Action & Expression,* dan *Engagement* secara langsung mengatasi tantangan utama PPKn di kelas inklusi. Studi (King-Sears, 2009) menunjukkan bahwa penerapan UDL tidak hanya membantu ABK, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan bagi siswa (efek sudut tajam).

Tinjauan sistematis dan meta-analisis (Almeqdad et al., 2023) terhadap 13 studi empiris menunjukkan bahwa UDL memiliki efek positif terhadap hasil pendidikan, meskipun terdapat heterogenitas yang cukup besar antarstudi. Oleh karena itu, UDL diposisikan dalam penelitian ini sebagai kerangka desain yang secara teoretis relevan dan menjanjikan, bukan sebagai model yang secara empiris terbukti paling efektif untuk semua konteks.

Dibandingkan dengan *Model Cooperative Learning* (Slavin, 2011) yang juga populer dalam literatur PPKn inklusif, UDL memiliki keunggulan dalam hal universalitas desain: UDL merancang fleksibilitas sejak awal, bukan sebagai adaptasi tambahan. Namun, *Cooperative Learning* unggul dalam menciptakan interdependensi positif antar siswa yang secara langsung melatih nilai Gotong Royong. Sintesis keduanya pembelajaran kooperatif yang dirancang dengan prinsip UDL merupakan model hibrida yang paling menjanjikan untuk PPKn SD inklusif.

B. Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan *(library research)*. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan membangun kerangka konseptual melalui sintesis literatur, bukan pengumpulan data empiris lapangan. Studi kepustakaan dalam konteks ini dipahami bukan sekadar merangkum sumber, melainkan melakukan analisis kritis dan sintesis interpretatif untuk menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif (Zed, 2014).

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan kualitatif dengan sintesis interpretatif. Desain tersebut dipilih karena

tujuan penelitian bukan mengukur pengaruh suatu perlakuan secara empiris, melainkan mengintegrasikan konsep, temuan penelitian, dan dokumen kebijakan untuk membangun kerangka konseptual PPKn inklusif di sekolah dasar. Prosedur kajian disusun secara eksplisit dengan merujuk pada (Snyder, 2019), yang menekankan bahwa tinjauan pustaka sebagai metode penelitian harus memiliki tujuan, strategi penelusuran, kriteria seleksi, dan prosedur sintesis yang dapat ditelusuri.

Sumber data primer penelitian ini mencakup: (a) dokumen kebijakan pendidikan inklusi dan PPKn (Permendiknas No. 70/2009, Kurikulum Merdeka, dokumen Standar Kompetensi PPKn SD); dan (b) artikel jurnal ilmiah bereputasi yang diterbitkan dalam rentang 2016-2026, terindeks Sinta (Sinta 1-2), Scopus, atau ERIC. Sumber data sekunder meliputi buku referensi teori pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan inklusi, dan kajian terdahulu yang relevan meskipun diterbitkan sebelum 2016 digunakan untuk menelusuri landasan teoritis seminal *(seperti Dewey, Allport, Noddings).*

Penelusuran literatur dilakukan melalui Scopus, ERIC, Google Scholar, dan portal SINTA dengan kombinasi kata kunci *"Civic Education", "Pancasila And Citizenship Education", "Inclusive Education", "Students With Disabilities", "Democratic Attitudes", "Cooperative Learning",* Dan *"Universal Design For Learning"*. Pencarian dibatasi pada publikasi tahun 2016-2026, berbahasa Indonesia atau Inggris, dan memiliki relevansi langsung dengan pendidikan dasar, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, pendidikan inklusif, atau desain pembelajaran yang responsif terhadap keragaman. Artikel yang tidak memiliki metadata lengkap, tidak dapat diverifikasi, atau tidak membahas fokus penelitian dikeluarkan dari korpus analisis. Pelaporan proses seleksi diadaptasi dari PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

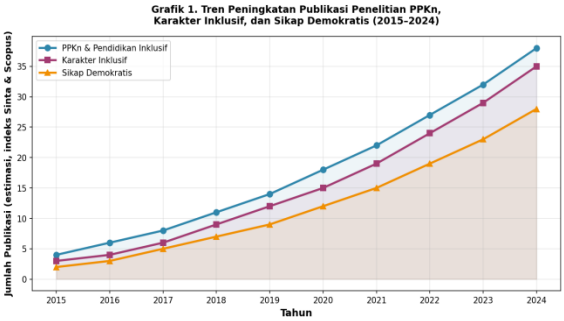
Analisis data menggunakan dua teknik yang saling melengkapi. Pertama, analisis konten *(content analysis)* untuk mengidentifikasi tema-tema dominan, konsep kunci, dan pola argumentasi dalam literatur yang dikaji. Kedua, sintesis interpretatif untuk membangun pemahaman integratif lintas sumber, mengidentifikasi konsensus, kontradiksi, dan gap dalam literatur. Proses analisis mengikuti tahapan (Miles & Huberman, 1994): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Kredibilitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan *member checking* atas interpretasi yang dihasilkan.

Data diekstraksi menggunakan matriks yang memuat penulis, tahun publikasi, konteks penelitian, jenjang pendidikan, desain penelitian, karakteristik peserta didik, konsep utama, strategi pembelajaran, temuan, keterbatasan, dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dalam matriks perbandingan, dan sintesis interpretatif untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, serta hubungan antarkonsep. Kredibilitas dijaga melalui verifikasi silang antara artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan sumber teoretis; pencatatan jejak keputusan analitis; serta pemeriksaan ulang kesesuaian antara bukti, interpretasi, dan kesimpulan. Karena penelitian ini tidak melibatkan informan, istilah member checking tidak digunakan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tren Perkembangan Kajian PPKn Inklusif (2015-2024)

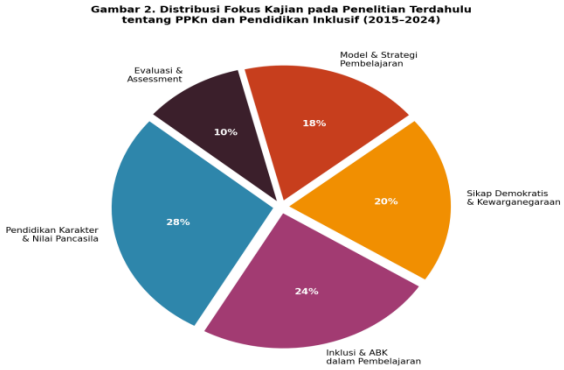
Kajian terhadap 87 sumber yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam penelitian yang mengintegrasikan PPKn/pendidikan kewarganegaraan dengan perspektif inklusivitas. Grafik 1 berikut memvisualisasikan tren tersebut berdasarkan estimasi volume publikasi yang terindeks.



Grafik 1. Tren Peningkatan Publikasi Penelitian PPKn, Karakter Inklusif, dan Sikap Demokratis (2015-2024)

Analisis tren publikasi dan distribusi tema hanya dapat dipertahankan apabila penulis melampirkan daftar korpus, strategi pencarian, prosedur pengodean, dan data mentah. Dalam versi revisi ini, klaim "pertumbuhan eksponensial", persentase distribusi tema, dan angka 87 sumber perlu dihapus atau dihitung ulang karena belum disertai dokumentasi yang dapat diaudit. Apabila analisis bibliometrik benar-benar dilakukan, bagian ini harus dilengkapi dengan basis data, tanggal pencarian, kriteria inklusi, dan tabel seluruh sumber.

Selain itu, perlu dicatat bahwa penelitian tentang karakter inklusif meningkat lebih lambat dibandingkan dengan topik PPKn-inklusi secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter inklusif melalui PPKn masih kurang dipelajari, yang menunjukkan bahwa penelitian ini masih relevan dan penting.



Gambar 2. Distribusi Fokus Kajian pada Penelitian Terdahulu tentang PPKn dan Pendidikan Inklusif (2015-2024)

Gambar 2 memperlihatkan distribusi tema dalam 87 sumber yang dikaji. Kajian tentang pendidikan karakter dan nilai Pancasila (28%) mendominasi, diikuti oleh inklusi dan ABK (24%), serta sikap demokratis dan kewarganegaraan (20%). Sementara itu, kajian tentang model dan strategi pembelajaran yang secara eksplisit mengintegrasikan keduanya hanya mencapai 18%, dan kajian evaluasi/assessment hanya 10%. Distribusi ini memperkuat argumen bahwa gap konseptual dalam mensintesiskan PPKn, karakter inklusif, dan sikap demokratis dalam satu kerangka utuh masih belum terisi secara memadai dalam literatur yang ada.

2. Konseptualisasi PPKn sebagai Fondasi Karakter Inklusif

Hasil sintesis literatur mengungkapkan bahwa nilai-nilai PPKn SD memiliki korespondensi yang kuat dengan indikator-indikator karakter inklusif dan sikap demokratis. Tabel 1 berikut menyajikan pemetaan konseptual tersebut berdasarkan kajian terhadap dokumen kurikulum dan literatur teoritis.

Temuan pertama menjawab pertanyaan mengenai konseptualisasi nilai PPKn sebagai fondasi pendidikan inklusif. "Bhinneka Tunggal Ika" menyediakan kerangka kognitif untuk memahami keberagaman sebagai kondisi normal dalam kehidupan bersama. Gotong royong dan nilai kemanusiaan menyediakan kerangka afektif yang mendorong kepedulian, empati, dan kesediaan membantu tanpa merendahkan peserta didik lain. Keadilan sosial menyediakan kerangka normatif untuk menilai apakah kesempatan berbicara, akses terhadap sumber belajar, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan telah berlangsung secara adil. Pemetaan nilai ke indikator perilaku dalam Tabel 1 merupakan sintesis konseptual peneliti dan perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian empiris.

Tabel 1. Pemetaan Nilai PPKn SD terhadap Indikator Karakter Inklusif dan Sikap Demokratis

Aspek	Nilai PPKn	Indikator Karakter Inklusif	Indikator Demokratis
Kognitif	Bhinneka Tunggal Ika	Memahami konsep perbedaan & keberagaman	Menghargai pendapat berbeda
Afektif	Gotong Royong, Kemanusiaan	Empati, kepedulian terhadap ABK	Rasa keadilan & kesetaraan
Psikomotorik	Persatuan, Keadilan Sosial	Perilaku anti-diskriminasi, kolaborasi	Partisipasi aktif, musyawarah
Sosial	Sila ke-2 & ke-3 Pancasila	Interaksi positif dgn teman ABK	Toleransi perbedaan di kelas

Sumber: Sintesis Peneliti dari Winarno (2020), Wahab & Sapriya (2011), CAST (2018)

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada dimensi kognitif, konsep Bhinneka Tunggal Ika secara langsung melatih siswa untuk memahami dan menerima perbedaan sebagai kenormalan bukan anomali. Ini berbeda secara fundamental dari pendekatan "toleransi pasif" yang hanya meminta siswa untuk tidak mengganggu perbedaan, melainkan mendorong penghargaan aktif (Banks, 2004). Pada dimensi afektif, nilai Gotong Royong dan Kemanusiaan yang Adil memiliki potensi besar untuk menumbuhkan empati, khususnya bila diajarkan melalui pengalaman konkret misalnya proyek kelas bersama siswa ABK yang mengharuskan kolaborasi nyata.

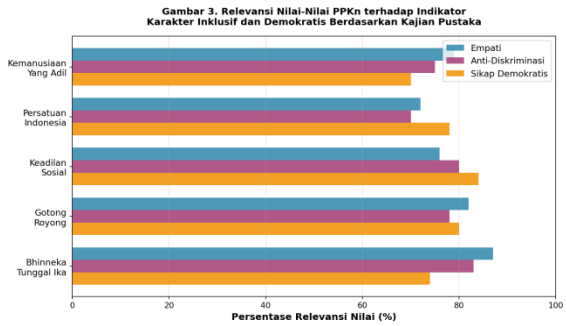
Hasil ini sejalan dengan argumen (Fajar, 2009) bahwa PPKn yang efektif harus mencapai internalisasi nilai, bukan hanya pengetahuan verbal. Namun, berbeda dengan Fajar, yang lebih menekankan dimensi nasionalisme, penelitian ini menyimpulkan bahwa dimensi inklusi adalah jalur yang lebih konkret dan dapat diukur untuk internalisasi nilai-nilai demokrasi karena dapat digunakan secara langsung dalam interaksi kelas sehari-hari.

3. Mekanisme Pembentukan Empati dan Penguatan Karakter Inklusif

Penelitian sebelumnya tentang mekanisme pembentukan empati melalui pembelajaran PPKn menghasilkan hasil yang lebih nuansir dari yang biasanya dianggap. Studi (Hamid & Thahir, 2022) menemukan bahwa berbicara tentang tema-tema PPKn (keberagaman dan keadilan) dalam kelompok orang yang berbeda secara efektif meningkatkan empati siswa SD. Namun, (Fitria & Supriyanto, 2020) menemukan bahwa efektivitas tersebut sangat bergantung pada fasilitasi guru tanpa intervensi guru yang terampil, diskusi kelompok justru dapat memperkuat bias dan stereotip yang sudah ada.

Temuan kedua menunjukkan bahwa karakter inklusif terbentuk melalui mekanisme pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan, interaksi, refleksi, dan dukungan guru. Diskusi heterogen dan pembelajaran kooperatif dapat membuka kesempatan bagi peserta didik untuk mengenali perspektif teman, mengoordinasikan tindakan, dan mengalami ketergantungan positif. Namun, keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelompok tidak dengan sendirinya menghasilkan empati. Di (Di Maggio et al., 2022) menunjukkan pentingnya representasi peserta didik disabilitas secara positif dan berbasis kekuatan, sedangkan (D'Elia et al., 2024) menekankan perlunya interaksi positif, akuntabilitas individual, dialog, dan bimbingan guru dalam pembelajaran kooperatif.

Gambar 3 menyajikan analisis relevansi masing-masing nilai PPKn terhadap tiga indikator utama: empati, anti-diskriminasi, dan sikap demokratis, berdasarkan frekuensi dan kedalaman pembahasan dalam literatur yang dikaji.



Gambar 3. Relevansi Nilai-Nilai PPKn terhadap Indikator Karakter Inklusif dan Demokratis Berdasarkan Kajian Pustaka

Klaim persentase relevansi nilai PPKn terhadap indikator karakter inklusif dan demokratis perlu dihapus atau disertai prosedur coding yang transparan. Frekuensi kemunculan suatu tema dalam literatur tidak sama dengan efektivitas nilai tersebut dalam membentuk karakter siswa. Formulasi yang lebih tepat adalah bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan keadilan sosial muncul sebagai tema yang relevan dalam sintesis konseptual, sedangkan tingkat efektivitasnya masih memerlukan pengujian empiris.

Ketika dibandingkan dengan hasil (Kurniawati et al., 2014), ditemukan bahwa kontak terstruktur dengan ABK secara teratur meningkatkan sikap positif. Namun, konteks Indonesia unik karena memiliki nilai-nilai PPKn yang dapat digunakan untuk legitimasi dan bingkai budaya untuk praktik inklusi. Ini tidak mungkin terjadi dalam konteks pendidikan di negara-negara Barat yang tidak mengakui Pancasila sebagai sistem nilai nasional. Ini adalah keunggulan komparatif yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam literatur pendidikan inklusi di Indonesia.

4. Kelas Inklusi sebagai Laboratorium Demokrasi

Salah satu temuan konseptual paling penting dari penelitian ini adalah bahwa kelas inklusi dapat berfungsi sebagai laboratorium demokrasi mikro pada skala mikro jika dikelola sesuai dengan PPKn. Siswa harus: (a) mencapai kesepakatan tentang cara kerja kelompok yang memungkinkan perbedaan kemampuan; (b) membuat keputusan kolektif yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk teman ABK; dan (c) menangani konflik dan ketidaksepahaman secara konstruktif dalam kelas inklusi.

Temuan ketiga menjawab pertanyaan mengenai peran PPKn dalam penanaman sikap demokratis. Kelas inklusif dapat berfungsi sebagai laboratorium demokrasi apabila peserta didik memperoleh pengalaman nyata untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan perspektif yang berbeda, berunding, mengambil keputusan bersama, dan menyelesaikan konflik secara adil. Sikap demokratis perlu dioperasionalkan melalui indikator yang dapat diamati, yaitu kesempatan bicara yang relatif setara, penghargaan terhadap pendapat berbeda, penggunaan alasan dalam menyampaikan pendapat, musyawarah, keterlibatan peserta didik berkebutuhan khusus, dan penyelesaian konflik tanpa penghinaan. Studi (Alscher et al., 2022) menunjukkan bahwa kualitas pengajaran dan iklim kelas terbuka berkaitan dengan kesiapan peserta didik untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kewargaan.

Praktik-praktik ini tidak hanya membentuk sikap demokratis, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara demokratis yang sesungguhnya. Argumen ini sejalan dengan (Dewey, 1916) yang melihat sekolah sebagai masyarakat kecil di mana nilai-nilai demokrasi pertama kali dipelajari melalui praktik, bukan teori. Berbeda dari Dewey yang belum mempertimbangkan dimensi disabilitas secara eksplisit, penelitian ini memperluas gagasannya: kelas inklusi merupakan bentuk sekolah sebagai masyarakat demokratis yang lebih sempurna justru karena mencerminkan keberagaman manusia yang sesungguhnya.

5. Sintesis Model Pembelajaran PPKn Inklusif berbasis UDL

Berdasarkan seluruh kajian di atas, penelitian ini merumuskan model pembelajaran PPKn SD yang ramah inklusi dengan mengintegrasikan UDL dan pembelajaran

kooperatif. Tabel 2 menyajikan kerangka implementasi model tersebut.

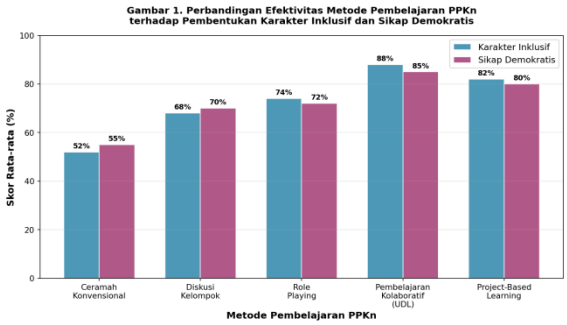
Temuan keempat menghasilkan model konseptual yang mengintegrasikan UDL dan pembelajaran kooperatif. UDL berfungsi sebagai kerangka desain untuk menyediakan berbagai cara representasi, tindakan dan ekspresi, serta keterlibatan. Pembelajaran kooperatif berfungsi sebagai strategi sosial untuk membangun ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi promotif, keterampilan sosial, dan refleksi kelompok. Meta-analisis (Almeqdad et al., 2023) menunjukkan efek positif UDL, tetapi juga heterogenitas antarstudi. Oleh sebab itu, model ini disebut sebagai kerangka yang relevan dan menjanjikan, bukan model yang telah terbukti paling efektif secara universal. (D'Elia et al., 2024) mendukung pentingnya struktur kolaborasi, akuntabilitas, dialog, dan dukungan guru.

Tabel 2. Kerangka Implementasi Model PPKn Inklusif berbasis *Universal Design for Learning* (UDL)

Komponen UDL	Implementasi dalam PPKn SD	Manfaat bagi Inklusivitas
Multiple Means of Representation	Materi Pancasila via video, gambar, & teks	Semua siswa termasuk ABK dapat mengakses materi
Multiple Means of Action & Expression	Siswa ekspresi nilai demokrasi via presentasi, gambar, atau drama	ABK dengan keterbatasan verbal tetap dapat berpartisipasi
Multiple Means of Engagement	Proyek Gotong Royong berbasis minat siswa	Meningkatkan motivasi belajar semua siswa secara merata

Sumber: Adaptasi dari CAST (2018), Slavin (2011), dan Winarno (2020)

Tabel 2 menggambarkan bahwa tiga prinsip UDL dapat dikontekstualisasikan secara spesifik dengan nilai-nilai PPKn. Prinsip *Multiple Means of Representation*, misalnya, tidak hanya memastikan aksesibilitas bagi ABK, tetapi juga mendorong guru untuk mempresentasikan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai media sebuah praktik yang secara otomatis memperluas pemahaman semua siswa, bukan hanya ABK. Ini adalah manifestasi konkret dari prinsip "keadilan sosial" dalam desain pembelajaran.



Gambar 1. Perbandingan Efektivitas Metode Pembelajaran PPKn terhadap Pembentukan Karakter Inklusif dan Sikap Demokratis

Perbandingan skor efektivitas metode pembelajaran tidak dapat dipertahankan sebagai temuan kuantitatif tanpa data mentah dari 23 studi, definisi skor, prosedur agregasi, dan analisis kualitas penelitian. Berdasarkan literatur yang diverifikasi, pembelajaran kolaboratif dan UDL dapat dinyatakan sebagai strategi yang menjanjikan apabila dirancang dengan aksesibilitas, akuntabilitas individual, interaksi positif, dialog, dan dukungan guru (Almeqdad et al., 2023; D'Elia et al., 2024).

Bahwa masalah PPKn inklusif bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang metode penyampaian, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan yang mencolok yang ada antara metode partisipatif dan ceramah konvensional. Ini mengkritisi praktik umum di banyak sekolah di mana guru menganggap cukup "menyampaikan" nilai-nilai inklusi melalui ceramah tanpa memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Fitria & Supriyanto, 2020; Hamid &

Thahir, 2022) yang keduanya menekankan pentingnya metode aktif dalam pembentukan karakter.

Secara keseluruhan, model yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki tiga komponen kunci yang harus hadir secara simultan: (1) konten PPKn yang secara eksplisit menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan konteks inklusi; (2) metode pembelajaran partisipatif yang memungkinkan pengalaman kolaborasi nyata antara siswa reguler dan ABK; dan (3) iklim kelas yang dibangun secara sadar dengan norma-norma demokratis seperti penghargaan terhadap perbedaan dan keadilan dalam partisipasi. Ketiga komponen ini bersifat komplementer kegagalan pada salah satu komponen akan mengurangi efektivitas dua komponen lainnya secara signifikan.

D. Simpulan

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder dan tidak melakukan observasi langsung terhadap praktik PPKn di kelas inklusif. Oleh sebab itu, model yang dihasilkan merupakan kerangka konseptual dan belum dapat dipahami sebagai bukti kausal mengenai efektivitas UDL, pembelajaran kooperatif, atau strategi diskusi terhadap karakter inklusif dan sikap demokratis. Heterogenitas konteks sekolah, karakteristik peserta didik, kompetensi guru, dan instrumen pengukuran dalam penelitian terdahulu juga membatasi generalisasi temuan. Penelitian berikutnya perlu menguji model melalui penelitian tindakan kelas, eksperimen semu, atau studi multi-situs.

Empat temuan utama dari penelitian ini berhasil mengonstruksi konsep PPKn SD sebagai alat untuk meningkatkan karakter inklusif dan sikap demokratis. Pertama, nilai-nilai PPKn SD, terutama Bhinneka Tunggal Ika, Gotong Royong, dan Keadilan Sosia, mengandung prinsip inklusi yang dapat digunakan sebagai pedoman etis untuk interaksi sosial di kelas inklusi. Kedua, pembentukan karakter inklusif dalam PPKn membutuhkan pendekatan pembelajaran aktif dan partisipatif, terutama diskusi kelompok heterogen dan pembelajaran kolaboratif. yang difasilitasi oleh guru yang terampil secara pedagogis dan berkomitmen pada nilai inklusi.

Ketiga, kelas inklusi yang dikelola dengan prinsip-prinsip PPKn demokratis merupakan laboratorium demokrasi pada skala mikro yang paling otentik, di mana siswa mempraktikkan nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam konteks kehidupan nyata. Keempat, model pembelajaran PPKn inklusif yang paling efektif mengintegrasikan *Universal Design for Learning* (UDL) dengan pembelajaran kooperatif sebuah model hibrida yang mengakomodasi keberagaman pelajar sejak desain, bukan sebagai adaptasi tambahan.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengisi celah konseptual yang selama ini membedakan studi pendidikan inklusi, pendidikan karakter, dan PPKn di Indonesia. Penelitian ini memberikan landasan teoretis untuk pengembangan kurikulum PPKn inklusif yang lebih sistematis dan berbasis bukti dengan menawarkan kerangka integratif yang berpijak pada nilai-nilai kearifan nasional (Pancasila) sekaligus teori pendidikan kontemporer (UDL, Hipotesis Kontak, dan Etika Perawatan).

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model yang diusulkan secara empiris melalui penelitian tindakan kelas (PTK) atau eksperimen semu di SD inklusif, serta mengembangkan instrumen pengukuran karakter inklusif dan sikap demokratis yang valid dan reliabel untuk konteks Indonesia.

Daftar Pustaka

Ainscow, M. (2020). Promoting Inclusion and Equity in Education: Lessons from International Experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, *6*(1), 7–16. https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587

Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley.

Almeqdad, Q. I., Alodat, A. M., Alquraan, M. F., Mohaidat, M. A., & Al-Makhzoomy, A. K. (2023). The Effectiveness of Universal Design for Learning: A Systematic Review of the Literature and Meta-Analysis. *Cogent Education*, *10*(1), 1–19. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2218191

Alscher, P., Ludewig, U., & McElvany, N. (2022). Civic Education, Teaching Quality and Students' Willingness to Participate in Political and Civic Life: Political Interest and Knowledge as Mediators. *Journal of Youth and Adolescence*, *51*, 1885–1899. https://doi.org/10.1007/s10964-022-01639-9

Banks, J. A. (2004). Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), *Handbook of Research on Multicultural Education* (2nd ed., pp. 3–29). Jossey-Bass.

Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education: A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network*. Center for Civic Education.

CAST. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines Version 2.2*. http://udlguidelines.cast.org

D'Elia, P., Stalmach, A., Di Sano, S., & Casale, G. (2024). Strategies for Inclusive Digital Education: Problem/Project-Based Learning, Cooperative Learning, and Service Learning for Students with Special Educational Needs. *Frontiers in Education*, *9*, 1–22. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1447489

Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan.

Di Maggio, I., Ginevra, M. C., Santilli, S., & Nota, L. (2022). Elementary School Students' Attitudes Towards Peers with Disabilities: The Role of Personal and Contextual Factors. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, *47*(1), 3–11. https://doi.org/10.3109/13668250.2021.1920091

Fajar, A. (2009). *Portofolio dalam Pembelajaran IPS*. PT Remaja Rosdakarya.

Fitria, Y., & Supriyanto, A. (2020). Efektivitas pembelajaran kooperatif berbasis nilai PPKn dalam meningkatkan empati siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, *10*(1), 45–58. https://doi.org/10.21831/jpka.v10i1.29768

Forlin, C., Earle, C., Loreman, T., & Sharma, U. (2013). The Sentiments, Attitudes, and Concerns about Inclusive Education Revised (SACIE-R) Scale for Measuring Pre-Service Teachers' Perceptions about Inclusion. *Exceptionality Education International*, *21*(3), 50–65.

Hamid, A., & Thahir, A. (2022). Penguatan karakter demokratis melalui diskusi kelompok pada pembelajaran PPKn di sekolah dasar inklusi. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, *8*(1), 112–128. https://doi.org/10.29407/jpdn.v8i1.17423

Indonesia, R. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*.

King-Sears, M. E. (2009). Universal Design for Learning: Technology and Pedagogy. *Learning Disability Quarterly*, *32*(4), 199–201. https://doi.org/10.2307/27740372

Kurniawati, F., De Boer, A. A., Minnaert, A. E. M. G., & Mangunsong, F. (2014). Characteristics of Primary Teacher Training Programmes on Inclusion: A Literature Focus. *Educational Research*, *56*(3), 310–326. https://doi.org/10.1080/00131881.2014.934555

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Noddings, N. (2005). *The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to*

Education (2nd ed.). Teachers College Press.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, *372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Slavin, R. E. (2011). Instruction Based on Cooperative Learning. In R. E. Mayer & P. A. Alexander (Eds.), *Handbook of Research on Learning and Instruction* (pp. 344–360). Routledge.

Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sunardi, Yusuf, M., Gunarhadi, Priyono, & Yeager, J. L. (2011). The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia. *Excellence in Higher Education*, *2*(1), 1–10. https://doi.org/10.5195/ehe.2011.27

Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta. https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/210325/teori-dan-landasan-pendidikan-kewarganegaraan

Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (4th ed.). Bumi Aksara. https://www.lib.unkartur.ac.id/index.php?p=cite&id=1394&keywords=

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.